



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 316 /EKO/2025

TENTANG

PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2027

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah agar kabupaten/kota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022....

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12)
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

13. Peraturan....

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, SDA dan Administrasi Pembangunan Nomor: B/100.3.3.2/178/Eko.2/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Hal: Mohon Koreksi Draft Keputusan Bupati tentang Peta Jalan (*roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2027.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2027 bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman pengendalian inflasi daerah;
- b. menjadi dasar penyusunan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara periodikal;
- c. evaluasi *roadmap* dan program kerja ke depan akan dilaporkan secara berkala Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- d. memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan karakteristik daerah; dan
- e. mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah membuat inovasi program.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara struktural bertanggung jawab kepada kepala instansi masing-masing dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi pelaksana pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2027.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 188.46/ 316 /EKO/2025
 TENTANG
 PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN
 INFLASIDAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 TAHUN 2025-2027

PENJABARAN PETA JALAN (ROADMAP) PENANGGULANGAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 – 2027

Nomor	Strategi Kunci	Program Strategis	Program	Sub Kegiatan	TIME LINE TARGET			Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	
					KELUARAN	KELUARAN	KELUARAN	
1	Keterjangkauan Harga	Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	26 Kali	26 Kali	26 Kali	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Industri
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Industri
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	12 kali	12 kali	12 kali	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Industri

Nomor	Strategi Kunci	Program Strategis	Program	Sub Kegiatan	TIME LINE TARGET			Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	
					KELUARAN	KELUARAN	KELUARAN	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 kali	48 kali	48 kali	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Industri
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	176 orang	135 Orang	150 Orang	Dinas Sosial
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50 orang + 2 kelompok	62 Orang	65 Orang	Dinas Sosial
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	168 orang	198 Orang	220 Orang	Dinas Sosial
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Tingkat Kabupaten Kota	24 kali gerakan pangan murah	24 kali gerakan pangan murah	24 kali gerakan pangan murah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengawasan Pendistribusian LPG Bersubsidi pada Agen dan Pangkalan	2 kali	2 kali	2 kali	Bagian PSDA2P

Nomor	Strategi Kunci	Program Strategis	Program	Sub Kegiatan	TIME LINE TARGET			Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	
		Mengelola Permintaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KELUARAN Bibit untuk posyandu di 18 desa , kegiatan gemar makan telur rebus dan pisang 4 kali kegiatan	KELUARAN Bibit untuk posyandu di 18 desa , kegiatan gemar makan telur rebus dan pisang 4 kali kegiatan	KELUARAN Bibit untuk posyandu di 18 desa , kegiatan gemar makan telur rebus dan pisang 4 kali kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketersediaan Pasokan	Peningkatan Produksi Lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen hasil penelitian	1 dokumen hasil penelitian	1 dokumen hasil penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 dokumen action plan	1 dokumen action plan	1 dokumen action plan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji / Benih	300 Ton	400 Ton	400 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	6128 Batang	15000 Batang	15500 Batang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Nomor	Strategi Kunci	Program Strategis	Program	Sub Kegiatan	TIME LINE TARGET			Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	
					KELUARAN	KELUARAN	KELUARAN	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3000 Batang	2500 Batang	2500 Batang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	390 Ton	15 Ton	16 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	4 kali kegiatan pengawasan	12 kali kegiatan pengawasan	12 kali kegiatan pengawasan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	4 kali kegiatan pengawasan	12 kali kegiatan pengawasan	12 kali kegiatan pengawasan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	12 Ton	15 Ton	16 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3983 Ekor	13475 Ekor	13550 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Nomor	Strategi Kunci	Program Strategis	Program	Sub Kegiatan	TIME LINE TARGET			Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	
					KELUARAN	KELUARAN	KELUARAN	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, dan Hortikultura, dan Perkebunan	1746 Ha	4500 Ha	4500 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1746 Ha	1100 Ha	1100 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6 kegiatan monitoring	9 kegiatan monitoring	12 kegiatan monitoring	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			(nama program pada dokumen anggaran)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Kolam Bundar diameter 3 meter sebanyak, 1 kolam bundar diameter 6 tinggi 1,6 , 4 kolam diameter 6 tinggi 1,3 meter , 50 bak pemeliharaan larva ikan air tawar, 20 bak filter, root blower, 1 unit tabung oksigen, bantuan bibit nila 2 kelompok, bibit patin 3 kelompok,			Dinas Perikanan